Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Literasi Politik, Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Mahasiswa Studi Kasus di Universitas PGRI Yogyakarta

Stanislaus Jebarus[1]*, Sunarso[2]
[1-2]Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: *stanislausjebarus.2024@student.uny.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026

Page: 6971-6984

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4882

Article History:

Received: Agustus 15, 2026

Revised: September 19, 2026

Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract *: This study aims to analyse the role of Citizenship Education in strengthening political literacy, awareness and participation among students at Universitas PGRI Yogyakarta, while identifying supporting and inhibiting factors. A qualitative case study design was employed. Participants were purposively selected from students who had completed Citizenship Education and lecturers teaching the course. Data were collected through in-depth interviews, participant observation and documentation, validated through methodological triangulation, and analysed through data reduction, presentation and conclusion drawing (Miles & Huberman, 2022). Findings indicate that Citizenship Education strengthens political literacy through understanding checks and balances and critically verifying information. Political awareness develops through greater self-efficacy and applying Pancasila values when assessing public policy. Political participation is reflected in involvement in campus organisations, political education and community conflict mediation. Effective learning is supported by a democratic classroom climate and lecturers acting as facilitators, but constrained by limited discussion time, academic workload and complex political terminology. These findings highlight Citizenship Education's role in developing critical, participatory students.*

Keywords *: Citizenship Education, Political Literacy, Political Awareness, Political Participation, Case Study, Universitas PGRI Yogyakarta.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek dipilih secara *purposive*, meliputi mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah PKn dan dosen pengampu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian diuji melalui triangulasi metode serta dianalisis menggunakan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn memperkuat literasi politik melalui pemahaman sistem *checks and balances* dan kemampuan memverifikasi informasi secara kritis. Kesadaran politik berkembang melalui peningkatan efikasi diri dan penerapan nilai Pancasila dalam menilai

kebijakan publik. Partisipasi politik tercermin dalam keterlibatan organisasi kampus, edukasi politik, dan mediasi konflik di masyarakat. Efektivitas pembelajaran didukung iklim kelas demokratis dan peran dosen sebagai fasilitator, tetapi terkendala keterbatasan waktu diskusi, beban akademik, dan kompleksitas istilah politik. Temuan ini menegaskan peran strategis PKn dalam membentuk mahasiswa yang kritis dan partisipatif.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Literasi Politik, Kesadaran Politik, Partisipasi Politik, Studi Kasus, Universitas PGRI Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan menanamkan identitas kebangsaan, nasionalisme, nilai demokrasi, supremasi hukum, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara (Widiatmaka, 2022; Julfian et al., 2023). PKn juga membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sistem politik, hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan agar mampu bersikap kritis terhadap dinamika sosial-politik (Sulina et al., 2024). Di tengah perkembangan demokrasi, mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan perlu memiliki literasi politik yang mencakup pemahaman terhadap sistem pemerintahan, mekanisme demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu politik terkini (Azil Hanifa Azzahra et al., 2024; Nurhasanah et al., 2024). Literasi politik tersebut menjadi dasar pembentukan kesadaran politik dan pengambilan keputusan yang kritis serta bertanggung jawab (Anugrah, 2024).

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah memperoleh pembelajaran PKn, kesadaran dan partisipasi politik mereka masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang kurang efektif, materi yang belum relevan dengan realitas politik, serta rendahnya motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi (Moento et al., 2025; Nurul Hidayati & Sri Rukmini, 2021; Rista et al., 2023; Waskita et al., 2023). Berdasarkan teori Civic Engagement, pendidikan kewarganegaraan seharusnya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk terlibat dalam kehidupan politik (Westheimer & Kahne, 2004). Oleh karena itu, PKn perlu dikembangkan melalui pembelajaran berbasis riset dan isu-isu aktual agar mampu menjawab tantangan demokrasi, termasuk rendahnya partisipasi pemilih (Salsabila et al., 2023).

Kesadaran politik mencerminkan sikap kritis, kepekaan, dan pemahaman terhadap dinamika politik yang mendorong mahasiswa menjadi warga negara aktif, mampu menghindari disinformasi, serta bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa (Hadian et al., 2025). Kesadaran tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi politik, mulai dari menggunakan hak pilih dalam Pemilu hingga bergabung dalam organisasi mahasiswa, melakukan advokasi kebijakan, dan mengikuti demonstrasi damai (Amanda et al., 2023). Namun, rendahnya partisipasi pemilih muda dalam sejumlah Pemilu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas PKn dalam membentuk literasi dan kesadaran politik serta mendorong keterlibatan nyata mahasiswa (Setiawan et al., 2022).

Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena memiliki mahasiswa dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan daerah asal yang beragam. Sebagai kota pelajar dengan lingkungan sosial-politik yang dinamis, Yogyakarta juga menyediakan peluang bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan isu demokrasi melalui organisasi kampus dan momentum Pemilu. Meskipun demikian, potensi lingkungan tersebut belum tentu menghasilkan partisipasi politik yang optimal, sehingga implementasi PKn di UPY perlu dikaji secara empiris.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran PKn berpengaruh signifikan terhadap literasi politik mahasiswa, dengan kontribusi sekitar 53,8%, meskipun motivasi diri dan faktor lain masih memengaruhi tingkat literasi politik (Hidayati et al., 2022). PKn juga

berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa, tetapi pengaruhnya relatif terbatas sehingga kesadaran politik belum merata (Razali et al., 2022). Keterbatasan penelitian yang menghubungkan PKn dengan literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi swasta, menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran PKn dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa UPY. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu PKn serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan relevansi kurikulum dan metode pembelajaran dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami pengalaman, persepsi, serta makna yang dibangun mahasiswa mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik. Pendekatan ini juga mengkaji proses, interaksi, dan dinamika pembelajaran yang memengaruhi karakter kewarganegaraan mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta secara mendalam (Creswell, 2016). Penelitian dilaksanakan di Universitas PGRI Yogyakarta selama enam bulan, mencakup persiapan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis awal, verifikasi keabsahan data, dan penyusunan laporan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan akademik penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) serta dosen pengampu untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi terkait literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi perkuliahan, tugas mahasiswa, laporan kegiatan kemahasiswaan, serta publikasi dan literatur ilmiah yang relevan sebagai pendukung dan penguat analisis penelitian (Gunawan, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi metode untuk mengurangi bias serta meningkatkan keabsahan data (Denzin, 2002). Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan secara mendalam dan fleksibel sesuai fokus penelitian (Sugiono, 2020). Observasi partisipatif dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan guna memahami perilaku, interaksi, serta dinamika sosial mahasiswa dalam konteks alamiah (Schutz, 1967; Spradley, 1980). Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen akademik, arsip kegiatan, laporan, dan catatan relevan untuk melengkapi serta memverifikasi temuan wawancara dan observasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Literasi Politik Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Universitas PGRI Yogyakarta berperan penting dalam memperkuat literasi politik mahasiswa melalui pemahaman mengenai sistem pemerintahan, demokrasi, konstitusi, dan pembagian kekuasaan. Dosen pengampu, SH, menempatkan literasi politik sebagai capaian pembelajaran utama agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem politik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, ARP menekankan pembelajaran konstitusi dan mekanisme demokrasi melalui diskusi berbasis data.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memahami konsep sistem presidensial, trias politica, mekanisme checks and balances, serta representasi politik. Mahasiswa juga mampu menghubungkan ketentuan konstitusi dengan kebijakan publik, seperti alokasi anggaran

pendidikan sebesar 20%, dan memahami proses pembentukan peraturan melalui simulasi sidang DPR. Selain itu, mereka menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai isu politik, seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan literasi politik turut mendorong mahasiswa untuk lebih selektif dalam memperoleh informasi. Mereka membandingkan berita dari berbagai sumber, memeriksa situs resmi KPU, dan menggunakan media arus utama untuk memverifikasi informasi serta menghindari hoaks. Meskipun masih terdapat kesulitan memahami istilah politik yang kompleks, mahasiswa berupaya mengatasinya melalui pencarian informasi dan diskusi. Temuan ini menunjukkan bahwa PKn tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis, verifikasi informasi, dan penilaian kritis terhadap kebijakan publik.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran Politik Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta

Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Yogyakarta berperan dalam membentuk kesadaran politik melalui pemahaman hak dan kewajiban warga negara, tanggung jawab moral, serta etika dalam menyampaikan pendapat. Dosen SH menerapkan pendekatan edukatif, reflektif, dan praktis agar mahasiswa tidak sekadar menghafal norma, tetapi mampu menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan sikap mahasiswa dalam menggunakan kebebasan berpendapat. Setelah mengikuti PKn, mahasiswa menjadi lebih berani menyampaikan pandangan politik karena memahami perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, mereka juga menyadari pentingnya etika, kepatuhan terhadap hukum, serta larangan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Pengalaman berdiskusi turut mendorong mahasiswa untuk tidak langsung mempercayai informasi, melainkan memeriksa kebenarannya melalui berbagai sumber.

Kesadaran politik juga tercermin dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk menilai kebijakan publik, khususnya dalam aspek kemanusiaan, keterwakilan, persatuan, dan keadilan sosial. Mahasiswa menyadari bahwa keadilan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat miskin. Selain itu, suasana kelas yang terbuka dan menghargai perbedaan pendapat mendukung keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Mahasiswa juga mulai membiasakan diri menggunakan referensi yang valid dan membaca berita secara menyeluruh sebelum membagikannya. Secara keseluruhan, PKn berkontribusi dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa yang lebih kritis, etis, dan bertanggung jawab. Peran tersebut terlihat dari meningkatnya keberanian berpendapat, kehati-hatian dalam menerima informasi, internalisasi nilai Pancasila, serta kemampuan menghargai perbedaan dan memperjuangkan keadilan sosial.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mendorong Partisipasi Politik Mahasiswa, Baik di Lingkungan Kampus Maupun di Masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Universitas PGRI Yogyakarta berperan mendorong mahasiswa menjadi warga negara aktif dan bertanggung jawab melalui pembelajaran berbasis pengalaman serta keterlibatan langsung dalam kegiatan politik dan sosial. Dosen pengampu, Dr. Sigit Handoko, merancang proyek pembelajaran yang mendorong mahasiswa memahami mekanisme politik, berani berpartisipasi, dan bertindak secara etis. Dukungan juga diberikan melalui kerja sama dengan organisasi kampus seperti BEM dan DPM serta lembaga eksternal, termasuk pemerintah daerah, KPU, dan LSM. Di lingkungan kampus, partisipasi mahasiswa diwujudkan melalui Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa), pemilihan presiden mahasiswa, keikutsertaan dalam organisasi, serta penyampaian aspirasi terkait fasilitas pendidikan. Mahasiswa tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga membandingkan visi dan misi kandidat, mengedukasi rekan sejawat, mengelola administrasi organisasi, dan mengusulkan perbaikan fasilitas kampus.

Di masyarakat, mahasiswa berkontribusi melalui edukasi politik keluarga, mediasi konflik akibat perbedaan pilihan politik, serta penyampaian informasi mengenai visi, misi, dan rekam jejak

calon pemimpin berdasarkan sumber tepercaya. Partisipasi sosial juga dilakukan melalui kegiatan pengabdian di panti asuhan dan pemberdayaan kelompok disabilitas melalui pelatihan UMKM. Pengalaman tersebut meningkatkan kepedulian sosial, kemampuan komunikasi, kerja sama, dan efikasi diri mahasiswa. Dengan demikian, PKn di UPY mendorong partisipasi politik yang tidak terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam organisasi, penyampaian aspirasi, pendidikan politik masyarakat, dan pemberdayaan sosial. Pembelajaran yang memadukan teori dan praktik membantu mahasiswa menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Literasi, Kesadaran, dan Partisipasi Politik Mahasiswa

Efektivitas PKn di Universitas PGRI Yogyakarta dipengaruhi oleh metode pengajaran, dukungan institusi, dan kesiapan mahasiswa. Faktor pendukung utamanya adalah dosen yang demokratis dan terbuka dalam menciptakan suasana kelas yang aman bagi perbedaan pendapat. Dr. Sigit Handoko menerapkan pembelajaran partisipatif dengan aturan yang jelas untuk mencegah disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik emosional. Dukungan kampus berupa kesempatan berorganisasi, pendampingan dosen, fasilitas kegiatan mahasiswa, serta pemahaman mengenai perlindungan hukum turut meningkatkan keberanian mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu diskusi, padatnya jadwal dan beban akademik, kesulitan memahami istilah politik yang abstrak, serta rendahnya minat sebagian mahasiswa terhadap isu politik. Selain itu, dosen menghadapi tantangan ketika membahas isu sensitif, seperti polarisasi politik dan SARA, akibat bias awal, respons emosional, dan ketimpangan literasi mahasiswa. Penyebaran hoaks di media sosial juga menyulitkan mahasiswa dalam memperoleh informasi politik yang akurat. Keterbatasan dukungan dana untuk kegiatan organisasi menjadi kendala tambahan dalam merealisasikan program partisipasi mahasiswa.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, mahasiswa mencari referensi tambahan melalui internet, artikel ilmiah, jurnal resmi, dan sumber tepercaya serta berdiskusi dengan teman sejawat. Peningkatan alokasi waktu diskusi, penyederhanaan penyampaian materi, penguatan literasi digital, dan dukungan pendanaan kegiatan organisasi diperlukan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Secara keseluruhan, PKn di UPY telah berperan dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan waktu yang lebih baik, metode pembelajaran yang kontekstual, penguatan kemampuan verifikasi informasi, serta dukungan institusional yang memadai. Dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan mengatasi hambatan tersebut, PKn diharapkan semakin efektif dalam membentuk mahasiswa yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Pembahasan

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Memperkuat Literasi Politik Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta

Hasil penelitian mengenai penguatan literasi politik di Universitas PGRI Yogyakarta memperlihatkan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah menjalankan fungsinya sebagai pondasi utama pembentukan warga negara yang cerdas. Jika dikaitkan dengan teori *Civic Literacy* dari Henry Milner, literasi politik bukan sekadar penguasaan materi hafalan, melainkan kemampuan warga negara dalam mengolah pengetahuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dosen pengampu di UPY secara sadar telah meletakkan landasan ini melalui penetapan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang berfokus pada ranah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Bapak SH menegaskan bahwa target utama pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu memahami serta mengevaluasi sistem politik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Perencanaan yang matang ini menjadi langkah awal yang krusial bagi mahasiswa untuk memiliki kerangka berpikir yang logis dalam menganalisis fenomena politik di masyarakat. Keberhasilan ini membuktikan bahwa literasi politik di perguruan tinggi merupakan instrumen strategis untuk membangun kesadaran kewargaan yang mendalam.

Pengetahuan dasar mengenai institusi politik merupakan pilar pertama dalam teori Milner yang telah dikuasai dengan baik oleh mahasiswa UPY melalui pemahaman sistem pembagian kekuasaan. Mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi mampu menjelaskan konsep *checks and balances* sebagai mekanisme untuk mencegah adanya kekuasaan tunggal yang absolut. Informan MFP menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting agar setiap lembaga dapat saling mengawasi demi menghindari penyalahgunaan wewenang. Senada dengan hal itu, informan UA menekankan bahwa transparansi dalam menjalankan kekuasaan negara harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pemahaman struktural ini menjadi sangat penting karena warga negara yang melek politik harus mengerti aturan main dalam sistem demokrasi agar hak-haknya tetap terlindungi. Pengetahuan ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai fungsi perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi publik.

Temuan mengenai penguasaan konsep struktural ini sejalan dengan hasil penelitian terbaru dari Al-Ansari et al. (2025a) yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn secara signifikan memengaruhi tingkat melek politik mahasiswa. Pemahaman yang kuat terhadap mekanisme pemerintahan merupakan bentuk nyata dari kecerdasan kewargaan atau *civic intelligence* sebagaimana dikemukakan dalam studi Nechesov & Ruponen (2024). Di Universitas PGRI Yogyakarta, mahasiswa tidak hanya mengenal istilah politik, tetapi mampu menguraikan peran nyata lembaga seperti DPR dalam membahas undang-undang bersama Presiden. Pengetahuan relasional semacam ini memberikan modal bagi mahasiswa untuk bertindak sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan secara objektif dan rasional. Keberhasilan dalam menanamkan konsep dasar ini menunjukkan bahwa kurikulum PKn di UPY telah berhasil menyederhanakan materi yang kompleks menjadi pemahaman yang fungsional bagi mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa literasi politik di kampus telah berjalan melampaui standar kognitif dasar menuju tingkat analisis yang lebih tinggi.

Pilar kedua dalam teori Milner berkaitan dengan kemampuan mengelola informasi, yang dalam penelitian ini ditunjukkan melalui perubahan perilaku mahasiswa dalam menyaring berita. Mahasiswa UPY memperlihatkan kecenderungan untuk bersikap kritis dan tidak lagi mudah percaya pada informasi politik yang tersebar di media sosial secara instan. Informan AN menyatakan bahwa dirinya tidak langsung mencerna informasi secara mentah-mentah, melainkan harus mencari validasi di *platform* lain yang lebih terpercaya. Kebiasaan untuk melakukan verifikasi silang ini menjadi sangat penting di tengah maraknya fenomena hoaks dan disinformasi digital saat ini. Informan FGU juga menekankan pentingnya merujuk langsung pada website resmi lembaga negara seperti KPU RI ketika menghadapi berita yang simpang siur mengenai pemilu. Perilaku informasi yang sehat ini merupakan tanda kematangan literasi digital yang telah tumbuh melalui proses pembelajaran di dalam kelas.

Analisis terhadap perilaku informasi mahasiswa ini selaras dengan penelitian Muñiz-Velázquez (2023) yang menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng pertahanan utama demokrasi. Selain itu, studi dari Bulya & Izzati (2024) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa penguatan literasi digital dalam PKn sangat krusial dalam menghadapi arus informasi yang tidak terkendali. Mahasiswa UPY telah mempraktikkan hal tersebut dengan membandingkan berbagai sumber berita arus utama seperti Kompas atau CNN sebelum menentukan pandangan politik mereka. Kesadaran bahwa informasi dari satu arus saja tidak cukup membuktikan bahwa mahasiswa memiliki standar keabsahan data yang tinggi dalam berpendapat. Kemampuan ini sangat diperlukan agar mahasiswa tidak terjebak dalam polarisasi politik yang sering kali dipicu oleh berita-berita yang tidak terverifikasi. Literasi informasi yang baik pada akhirnya akan mendorong terciptanya diskusi publik yang lebih berkualitas dan berbasis data di lingkungan kampus.

Kekuatan literasi politik mahasiswa juga terlihat dari kemampuan mereka dalam menghubungkan antara teks konstitusi yang abstrak dengan kebijakan publik yang nyata. Mahasiswa tidak lagi melihat UUD 1945 sebagai dokumen hukum yang jauh dari keseharian, melainkan sebagai dasar dari setiap kebijakan pemerintah yang mereka rasakan. Informan AN

memberikan contoh nyata mengenai sinkronisasi aturan pendidikan, di mana ia menyadari bahwa dana bantuan sekolah merupakan amanat langsung dari konstitusi. Pemahaman ini diperkuat oleh informan MFP yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas serta logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui tugas-tugas di kelas, mahasiswa diajarkan untuk melihat keterkaitan antara aturan dasar negara dengan program kerja pemerintah secara nyata. Hal ini membuktikan bahwa literasi politik telah membantu mahasiswa memahami hak-hak mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Metode pembelajaran yang partisipatif, seperti simulasi sidang dan analisis kasus, terbukti menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat kompetensi literasi ini. Informan FGU menceritakan bagaimana simulasi pembuatan draf rancangan undang-undang membantunya memahami prinsip bahwa aturan hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Pengalaman praktis semacam ini memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan metode ceramah tradisional yang hanya berfokus pada hafalan teori. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi penelitian terbaru yang menyarankan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan efektivitas pendidikan politik di perguruan tinggi. Mahasiswa belajar untuk teliti dan cermat dalam melihat susunan regulasi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan telah berhasil mentransformasi teori hukum yang rumit menjadi keterampilan praktis yang dapat digunakan mahasiswa dalam menganalisis masalah kenegaraan.

Kompetensi literasi politik mahasiswa mencapai puncaknya ketika mereka mampu memberikan analisis kritis terhadap isu-isu nasional yang sedang berkembang secara tajam. Informan AN menunjukkan hal ini melalui analisisnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon pemimpin yang ia nilai memiliki potensi konflik kepentingan keluarga. Begitu pula dengan informan UA yang mengkritisi implementasi program makan bergizi gratis dengan membandingkan antara anggaran yang besar dan realita nutrisi yang rendah di lapangan. Kemampuan untuk melihat sisi etis dan operasional di balik sebuah kebijakan politik menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ketajaman nalar yang sangat baik. Tingkat analisis seperti ini membuktikan bahwa mahasiswa UPY telah memenuhi kriteria warga negara yang kompeten menurut teori Milner. Mereka tidak hanya mengetahui "apa" yang terjadi dalam politik, tetapi juga mengerti "mengapa" hal itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai kemajuan, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan berupa istilah-istilah politik yang terkadang dirasakan terlalu abstrak oleh mahasiswa non-sosial. Namun, kemandirian mahasiswa dalam mengatasi hambatan ini dengan mencari penjelasan praktis atau bertanya kepada teman sejawat merupakan bentuk tanggung jawab belajar yang positif. Dukungan dari dosen yang demokratis serta iklim kampus yang menghargai perbedaan pendapat menjadi faktor pendukung yang menjaga semangat literasi tersebut tetap tumbuh subur. Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil menjalankan perannya dalam menciptakan mahasiswa yang melek politik dan memiliki daya kritis tinggi. Hasil ini memberikan optimisme bahwa lulusan UPY akan mampu menjadi agen literasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran Politik Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta

Hasil Penelitian mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik menunjukkan adanya pergeseran budaya politik dari tipe subjek menuju tipe partisipan. Merujuk pada teori Almond dan Verba, kesadaran ini mencakup tiga orientasi utama yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap sistem politik yang berjalan. Peningkatan orientasi kognitif terlihat dari pemahaman mahasiswa yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia serta jaminan perlindungan hukum dalam berpendapat. Hal ini sejalan dengan argumen Al-Ansari et al. (2025b) bahwa PKn di perguruan tinggi merupakan instrumen strategis untuk membangun kesadaran politik mahasiswa secara fundamental. Dosen pengampu sengaja menggunakan pendekatan edukatif-reflektif agar mahasiswa tidak sekadar menghafal norma, melainkan benar-benar

menghayati peran mereka sebagai warga negara. Perubahan ini membuktikan bahwa pengetahuan yang diberikan di kelas telah berhasil menyentuh sisi emosional dan keyakinan mahasiswa terhadap sistem demokrasi.

Aspek orientasi afektif dalam kesadaran politik ditandai dengan tumbuhnya rasa percaya diri atau efikasi politik pada diri mahasiswa secara nyata. Sebelum menempuh mata kuliah ini, beberapa mahasiswa merasa takut dan jarang menyampaikan pendapat politiknya karena ketidaktahuan mengenai aturan hukum yang berlaku. Namun, setelah memahami bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, daya kritis mereka mulai tumbuh dan merasa lebih berani bersuara di forum umum. Perasaan aman yang muncul dari pemahaman hukum memberikan dorongan moral bagi mahasiswa untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai diskusi politik. Hal ini memperkuat temuan Okorokova & Nikiforova (2025) bahwa peningkatan literasi politik berkorelasi positif dengan keinginan pemuda untuk berpartisipasi secara aktif. Efikasi diri ini merupakan modal penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton pasif dalam dinamika politik yang terjadi di lingkungannya.

Orientasi evaluatif mahasiswa juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai standar utama dalam menilai kebijakan publik. Mahasiswa tidak lagi melihat Pancasila sebagai hafalan semata, melainkan sebagai pedoman etis untuk mengukur keadilan sebuah produk hukum atau pernyataan politik. Penggunaan kelima sila sebagai indikator penilaian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kerangka berpikir yang komprehensif dan berakar pada jati diri bangsa. Secara khusus, sila keadilan sosial sering dijadikan kompas utama untuk melihat keberpihakan kebijakan terhadap rakyat kecil dan kelompok yang memiliki kebutuhan khusus. Ketajaman evaluasi ini membuktikan bahwa kesadaran politik mahasiswa UPY telah mencapai tingkat moralitas kewargaan yang tinggi sesuai dengan tujuan pembentukan *civic intelligence*. Kemampuan mengevaluasi ini sangat penting agar mahasiswa tetap objektif dalam melihat kinerja pemerintah tanpa terjebak dalam fanatisme golongan.

Kesadaran politik yang matang juga tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam menyeimbangkan antara penggunaan hak dan tanggung jawab etis secara bersamaan. Mahasiswa menyadari bahwa meskipun setiap orang bebas berpendapat, terdapat batasan hukum dan etika yang harus dipatuhi agar tidak merugikan kepentingan publik. Di ruang digital, kesadaran ini mewujud dalam bentuk penolakan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau penggiringan opini yang bersifat buruk. Pendidikan Kewarganegaraan berhasil menanamkan pemahaman bahwa setiap pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara fakta maupun moral. Penekanan pada etika komunikasi politik ini menjadi solusi nyata atas maraknya disinformasi yang sering kali memicu polarisasi di tengah masyarakat. Kesadaran akan tanggung jawab etis ini merupakan pondasi bagi terciptanya budaya politik partisipan yang sehat dan menghargai keberagaman.

Perubahan sikap mahasiswa terhadap isu publik setelah melakukan verifikasi informasi menunjukkan transformasi perilaku yang sangat positif di era informasi digital. Mahasiswa kini tidak lagi mudah percaya pada informasi yang datang di awal tanpa melakukan pengecekan data secara mendalam terlebih dahulu. Mereka belajar untuk tidak langsung bersikap reaktif terhadap kebijakan pemerintah sebelum membandingkan berbagai sumber berita dari lembaga resmi yang tepercaya. Kemampuan untuk menahan diri dan melakukan refleksi berdasarkan data merupakan indikator nyata dari tumbuhnya kesadaran politik yang dewasa. Perilaku informasi yang sehat ini melindungi mahasiswa dari berbagai bentuk manipulasi opini publik yang sering terjadi di media sosial. Sesuai dengan penelitian Rohmatin et al. (2024), literasi digital yang kuat akan mendorong tumbuhnya kesadaran kritis mahasiswa dalam merespons dinamika politik nasional.

Penciptaan iklim kelas yang aman dan demokratis oleh dosen pengampu menjadi faktor pendukung penting yang memfasilitasi tumbuhnya kesadaran politik mahasiswa. Dosen tidak memosisikan diri sebagai pemegang otoritas tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang menghargai setiap perbedaan pandangan dari para mahasiswanya. Kondisi ini membuat mahasiswa merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasi dan berlatih berargumen secara sehat tanpa takut mendapatkan diskriminasi. Ruang kelas berfungsi sebagai laboratorium demokrasi di

mana mahasiswa mempraktikkan cara menghormati pendapat orang lain meskipun memiliki perbedaan pilihan. Suasana akademik yang kondusif ini memperkuat orientasi afektif mahasiswa terhadap nilai-nilai demokrasi yang ideal dan inklusif. Kepercayaan mahasiswa terhadap proses dialogis ini menjadi modal sosial yang sangat berharga saat mereka berinteraksi di masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pembentukan kesadaran politik melalui PKn di UPY telah berhasil mencetak warga negara yang dewasa dan memiliki kepekaan sosial tinggi. Mahasiswa tidak hanya sadar akan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nilai keadilan bagi sesama warga negara. Internalisasi nilai Pancasila yang dipadukan dengan keterampilan verifikasi informasi menciptakan profil mahasiswa yang cerdas dan tidak mudah terpolarisasi. Pergeseran orientasi dari budaya politik subjek yang pasif menjadi partisipan yang aktif terlihat jelas dalam setiap hasil wawancara mahasiswa. Temuan ini memberikan keyakinan bahwa pendidikan di UPY mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Kesadaran politik yang matang ini diharapkan menjadi dasar bagi tindakan nyata yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mendorong Partisipasi Politik Mahasiswa, Baik di Lingkungan Kampus Maupun di Masyarakat

Pembahasan mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mendorong partisipasi politik mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta menunjukkan keberhasilan transformasi budaya politik dari tipe subjek menjadi tipe partisipan. Merujuk pada teori Almond dan Verba, tipe partisipan dicirikan oleh keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik yang didasari oleh kesadaran akan hak dan kewajibannya. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa partisipasi mahasiswa tidak lagi bersifat mobilisasi, melainkan muncul sebagai inisiatif sadar untuk berkontribusi bagi lingkungan kampus dan masyarakat. Dosen pengampu berperan penting dalam memicu perubahan ini melalui perancangan proyek pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif, bukan sekadar pengamat teori. Hal ini membuktikan bahwa strategi pengajaran yang tepat dapat mempercepat pembentukan perilaku politik yang aktif dan bertanggung jawab. Penguatan partisipasi ini menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan politik di tingkat perguruan tinggi.

Implementasi pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di UPY terbukti efektif dalam memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam berpolitik secara santun. SH menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan agar mahasiswa memahami mekanisme politik, berani terlibat, dan tetap bertanggung jawab secara etis. Melalui proyek ini, mahasiswa diajak untuk melakukan aksi nyata seperti edukasi pemilih pemula atau simulasi pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Ansari et al. (2025b) yang menyatakan bahwa *civic intelligence* harus diwujudkan dalam keterlibatan aktif yang produktif di masyarakat. Mahasiswa belajar bahwa suara dan tindakan mereka memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi di lingkungan terdekat mereka. Oleh karena itu, ruang kelas di UPY telah berhasil menjadi laboratorium sosial bagi praktik kewargaan yang sehat.

Di lingkungan kampus, partisipasi politik mahasiswa terwujud melalui keterlibatan aktif dalam sirkulasi kepemimpinan organisasi mahasiswa dan pemilihan umum kampus (Pemilwa). Mahasiswa seperti MFP dan GAN tidak hanya sekadar memberikan suara, tetapi berperan sebagai pemilih rasional yang membedah visi, misi, dan rekam jejak para kandidat. Mereka secara aktif mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi secara netral mengenai kualitas calon pemimpin guna menghindari pilihan yang bersifat emosional. Keterlibatan ini menunjukkan adanya peningkatan orientasi evaluatif mahasiswa terhadap sistem kekuasaan di tingkat mikro kampus. Selain itu, keterlibatan dalam struktur organisasi seperti HMP dan BEM memberikan pelajaran berharga mengenai kepemimpinan dan manajemen konflik. Partisipasi di lingkup kampus ini merupakan fondasi awal bagi mahasiswa sebelum terjun ke panggung politik nasional yang lebih luas.

Kontribusi administratif dalam organisasi mahasiswa, sebagaimana dilakukan oleh NDS sebagai sekretaris, juga merupakan bentuk praktik politik fungsional yang sangat bermakna. Meskipun terlihat sederhana, penataan administrasi dan arsip organisasi merupakan wujud

tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sebuah institusi demokratis. Mahasiswa belajar bahwa transparansi dan ketertiban administrasi adalah kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat organisasi. Praktik ini secara tidak langsung melatih mahasiswa untuk memiliki integritas dalam menjalankan tugas-tugas publik di masa depan. Peran-peran administratif ini melengkapi profil partisipasi mahasiswa yang tidak hanya fokus pada aksi massa, tetapi juga pada penguatan sistem organisasi. Dengan demikian, partisipasi politik di UPY mencakup spektrum yang luas mulai dari pengambilan kebijakan hingga pengelolaan tata kelola organisasi.

Salah satu temuan paling menarik adalah peran mahasiswa sebagai "agen literasi" dan mediator konflik politik di lingkungan keluarga dan masyarakat akar rumput. Informan AN menunjukkan keberanian luar biasa dalam merangkul keluarga yang terpecah akibat perbedaan pilihan politik melalui pendekatan budaya daerah. Sementara itu, FGU aktif memberikan penjelasan mengenai rekam jejak calon pemimpin kepada anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan akses informasi pendidikan. Tindakan ini membuktikan bahwa mahasiswa UPY mampu menjadi jembatan informasi yang tepercaya bagi masyarakat yang sering kali terpapar hoaks. Peran sebagai penjaga integrasi sosial ini merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai PKn telah terinternalisasi menjadi tindakan nyata untuk meredam polarisasi di tengah masyarakat.

Partisipasi mahasiswa juga menyentuh aspek pemberdayaan kelompok marginal dan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Informan UA melalui program kerja organisasinya berkolaborasi dengan Pertuni dan panti asuhan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka melalui pelatihan UMKM. Keterlibatan ini mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, dalam bentuk aksi kemanusiaan yang berdimensi politik kewargaan. Partisipasi semacam ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami politik dalam arti luas, yaitu sebagai upaya bersama untuk memperbaiki kualitas hidup sesama warga negara. Mahasiswa tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban moral untuk membantu mereka yang sering terabaikan oleh kebijakan pemerintah. Fokus pada isu inklusivitas ini memberikan warna tersendiri bagi profil partisipasi mahasiswa UPY yang sangat peduli pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dampak dari partisipasi aktif ini sangat dirasakan oleh mahasiswa dalam bentuk peningkatan efikasi politik dan kompetensi sosial secara mandiri. Informan AN mengibaratkan kontribusinya sebagai "kepingan puzzle" yang sangat berharga bagi kelengkapan sistem sosial di lingkungannya. Perasaan bahwa tindakan individu memiliki arti bagi kepentingan publik merupakan ciri utama dari warga negara yang memiliki budaya politik partisipan. Sejalan dengan penelitian Azis (2025), motivasi terbesar mahasiswa untuk terlibat sering kali didorong oleh rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Mahasiswa merasa lebih percaya diri dan kritis dalam melihat setiap persoalan publik yang terjadi di sekitar mereka. Peningkatan kompetensi ini menjadi modal penting bagi pengembangan karier dan peran sosial mereka setelah lulus dari perguruan tinggi.

Hasil pembahasan ini memperkuat temuan Al-Ansari et al. (2025a) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media yang sangat efektif untuk membangun literasi dan partisipasi politik. Kolaborasi antara kampus dengan lembaga eksternal seperti KPU dan LSM semakin memperluas jejaring dan ruang gerak mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu kewargaan. Dukungan institusi berupa fasilitas gedung organisasi dan keterbukaan pejabat kampus juga menjadi faktor pendorong utama bagi konsistensi partisipasi mahasiswa. Meskipun terdapat hambatan berupa manajemen waktu dan beban akademik, mahasiswa UPY tetap mampu menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan peran kewargaan mereka. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem pendidikan di UPY telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya partisipan politik yang cerdas. Partisipasi yang terstruktur dan didasari oleh etika ini menjadi harapan bagi keberlanjutan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil menjalankan perannya dalam mencetak mahasiswa yang partisipatif dan solutif.

Mahasiswa tidak hanya menguasai teori politik, tetapi mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Internalisasi nilai Pancasila yang dipadukan dengan keterampilan komunikasi politik menciptakan profil mahasiswa yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Pergeseran budaya politik dari subjek yang pasif menjadi partisipan yang aktif terlihat nyata dalam setiap narasi pengalaman mahasiswa. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model pendidikan politik yang berorientasi pada aksi nyata dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan lain dalam menguatkan peran mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Literasi, Kesadaran, dan Partisipasi Politik Mahasiswa

Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor pendukung dan penghambat yang bersifat sistemik. Keberhasilan dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa tidak terjadi di ruang hampa, melainkan bergantung pada kesiapan institusi serta motivasi personal mahasiswa. Faktor pendukung memberikan energi bagi keberlanjutan program, sementara faktor penghambat menjadi tantangan nyata yang harus dimitigasi secara berkelanjutan. Penelitian Alscher et al. (2022) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang kondusif memiliki korelasi positif terhadap pencapaian kompetensi kewargaan mahasiswa secara menyeluruh. Sinergi antara kebijakan kampus dan antusiasme mahasiswa menjadi kunci utama dalam mencapai target pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, pemetaan terhadap faktor-faktor ini menjadi sangat krusial untuk mengukur keberhasilan pendidikan politik di perguruan tinggi.

Salah satu faktor pendukung utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terciptanya iklim kelas yang demokratis melalui bimbingan dosen pengampu. Dosen di UPY berhasil membangun suasana yang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya rasa takut akan diskriminasi atau penghakiman. Pola komunikasi yang deliberatif ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide yang sehat di antara mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi. Sejalan dengan temuan Kashiha (2022), peran dosen sebagai fasilitator sangat menentukan kualitas diskusi politik di lingkungan akademik. Mahasiswa merasa lebih dihargai ketika perbedaan pandangan diterima sebagai bagian dari proses pendewasaan diri dalam berpolitik. Keamanan psikologis dalam berpendapat ini menjadi modal penting bagi tumbuhnya efikasi politik mahasiswa selama masa perkuliahan.

Dukungan institusional berupa ketersediaan fasilitas organisasi mahasiswa dan keterbukaan pejabat kampus turut menjadi pendorong kuat bagi partisipasi politik. Universitas memberikan ruang gerak yang memadai bagi organisasi mahasiswa untuk menjalankan program kerja yang berkaitan dengan isu kewargaan. Ketersediaan gedung yang nyaman dan pendampingan dosen pembina membuat mahasiswa merasa didukung secara sistemik dalam berorganisasi. Alscher et al. (2022) menegaskan bahwa dukungan fasilitas fisik dan manajerial dari kampus sangat esensial dalam membentuk kecerdasan kewargaan mahasiswa. Mahasiswa merasa aspirasi mereka ditanggapi secara positif oleh pihak rektorat sehingga motivasi untuk terus berpartisipasi tetap terjaga. Faktor institusi ini memperkuat keyakinan mahasiswa bahwa kampus adalah tempat yang tepat untuk melatih kepemimpinan politik mereka.

Meskipun banyak dukungan, keterbatasan waktu diskusi di kelas dan beban akademik yang padat sering kali menjadi hambatan utama yang dirasakan mahasiswa. Durasi jam pelajaran yang terbatas membuat eksplorasi terhadap isu-isu politik nasional yang kompleks tidak dapat dilakukan secara tuntas. Mahasiswa juga mengeluhkan jadwal perkuliahan yang sangat padat sehingga sulit menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan kegiatan organisasi. Informan GAN mengakui bahwa manajemen waktu menjadi tantangan terbesar saat harus menjalankan program kerja organisasi di tengah tumpukan tugas kuliah. Kondisi ini sering kali memaksa mahasiswa untuk memprioritaskan nilai akademik dibandingkan keterlibatan nyata dalam aksi kewargaan di masyarakat. Diperlukan strategi pengaturan jadwal yang lebih fleksibel agar potensi partisipasi politik mahasiswa dapat berkembang secara maksimal.

Hambatan lain muncul dari penggunaan istilah-istilah politik yang dianggap terlalu abstrak bagi mahasiswa dari program studi non-sosial. Mahasiswa dari prodi Pendidikan Luar Biasa atau Akuntansi sering kali merasa asing dengan terminologi politik yang jarang ditemukan dalam keseharian mereka. Kompleksitas bahasa politik ini dapat menurunkan minat dan rasa percaya diri mahasiswa dalam menganalisis isu-isu publik yang sedang berkembang. Informan IN menyatakan bahwa ia sering harus mencari penjelasan yang lebih sederhana di internet untuk memahami materi dari dosen. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan penyampaian materi tanpa mengurangi substansi nilai yang ingin ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan bahasa yang lebih membumi akan membantu mahasiswa dari semua disiplin ilmu untuk merasa lebih terhubung dengan isu kenegaraan.

Tantangan dalam mengelola respon emosional mahasiswa terhadap isu-isu sensitif seperti polarisasi politik dan SARA juga menjadi perhatian penting dosen. Isu-isu tersebut sering kali memicu perdebatan yang bersifat reaktif dan menutupi nalar kritis mahasiswa jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dosen harus menerapkan strategi mitigasi yang preventif dan pedagogis untuk menjaga agar diskusi tetap berada pada koridor etika. Penguatan literasi digital sangat penting untuk membantu siswa mengatasi bias emosional selama diskusi, karena emosi dapat sangat memengaruhi pemikiran kritis dan pengambilan keputusan dalam konteks digital. Penelitian Mata et al. (2021), menunjukkan bahwa banyak siswa kesulitan mengevaluasi informasi yang bias atau tidak demokratis secara kritis secara daring, seringkali dipengaruhi oleh respons emosional daripada analisis rasional. Ketidaksiapan mental dalam menerima perbedaan pandangan yang tajam dapat menghambat terciptanya ruang dialog yang produktif di kampus. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus terus menekankan pentingnya kedewasaan sikap dalam menghadapi keberagaman opini politik.

Fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial menjadi faktor penghambat eksternal yang cukup berat bagi literasi politik mahasiswa. Arus informasi yang sangat cepat dan sering tidak terverifikasi dapat mengaburkan pemahaman mahasiswa terhadap fakta politik yang sebenarnya. Mahasiswa dituntut memiliki keterampilan verifikasi yang tinggi agar tidak terjebak dalam pusaran informasi yang menyesatkan atau manipulatif. Ikhsan et al. (2021) menekankan bahwa literasi digital yang kuat adalah salah satu benteng bagi mahasiswa dalam menghadapi era pasca-kebenaran saat ini. Tantangan ini memaksa mahasiswa bekerja lebih keras dalam mencari keabsahan berita melalui berbagai jurnal dan website resmi pemerintah. Tanpa literasi digital yang memadai, efektivitas pendidikan dalam membentuk kesadaran politik yang objektif akan sulit tercapai secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, mahasiswa UPY mengembangkan strategi mandiri melalui kolaborasi antar teman sejawat dan pemanfaatan teknologi informasi. Mereka terbiasa melakukan diskusi kelompok kecil di luar jam kuliah untuk membahas konsep-konsep politik yang sulit dipahami. Kemandirian dalam mencari referensi tambahan melalui artikel dan video edukasi menunjukkan adanya motivasi internal yang kuat untuk tetap melek politik. Dukungan sebaya dan iklim organisasi yang solid membantu mahasiswa untuk tetap konsisten meskipun menghadapi tekanan beban akademik yang tinggi. Sinergi antara usaha mandiri mahasiswa dan bimbingan dosen yang inspiratif menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan durasi pertemuan formal. Pola belajar yang dinamis ini membuktikan bahwa mahasiswa memiliki daya lentur yang tinggi dalam menghadapi tantangan pendidikan politik.

Secara keseluruhan, efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan di UPY ditentukan oleh bagaimana faktor pendukung dioptimalkan dan faktor penghambat diminimalisir secara sistemik. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen jangka panjang institusi dalam menyediakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan kompetensi kewargaan mahasiswa. Kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi solusi untuk memperluas ruang partisipasi yang lebih nyata bagi mahasiswa. Meskipun masih ditemukan kendala teknis dan personal, capaian literasi dan kesadaran politik mahasiswa UPY tetap menunjukkan tren yang positif. Penyesuaian metode pembelajaran yang lebih praktis dan manajemen waktu yang lebih baik akan sangat membantu meningkatkan dampak pendidikan ini. Hasil penelitian ini

memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan model Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam memperkuat literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Penguatan literasi politik tercermin melalui pemahaman sistem checks and balances, kemampuan memverifikasi informasi, serta berpikir kritis terhadap kebijakan publik. Kesadaran politik berkembang melalui peningkatan kepercayaan diri, keberanian berpendapat, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial. Sementara itu, partisipasi politik diwujudkan melalui keterlibatan dalam organisasi dan pemilihan kampus, penyampaian aspirasi, edukasi politik, serta kegiatan sosial di masyarakat. Efektivitas pembelajaran didukung oleh iklim kelas demokratis, peran dosen sebagai fasilitator, dan fasilitas institusi, tetapi masih terkendala keterbatasan waktu diskusi, beban akademik, dan kompleksitas istilah politik. Dengan demikian, PKn berkontribusi terhadap pembentukan mahasiswa yang kritis, memiliki kesadaran politik, dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Berdasarkan temuan tersebut, dosen dan pengelola mata kuliah disarankan mengembangkan pembelajaran kontekstual melalui penyederhanaan istilah politik, diskusi berbasis kasus, simulasi demokrasi, serta penguatan literasi digital dan refleksi nilai Pancasila. Mahasiswa perlu didorong untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademik dengan keterlibatan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Pada tingkat kebijakan, universitas perlu memperkuat dukungan kelembagaan, pendanaan kegiatan kemahasiswaan, serta kemitraan dengan KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil guna memperluas pengalaman kewargaan mahasiswa. Penelitian selanjutnya direkomendasikan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dan menggunakan pendekatan campuran atau longitudinal untuk menguji efektivitas pembelajaran PKn serta mengkaji perkembangan literasi, kesadaran, dan partisipasi politik mahasiswa secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ansari, R., Al-Fahim, O., & Zang, B. (2025b). The Relationship between Civic Education and Active Political Participation of Students. *International Journal of Educational Narratives*. https://doi.org/10.70177/ijen.v3i2.2146

Alscher, P., Ludewig, U., & McElvany, N. (2022). Civic Education, Teaching Quality and Students' Willingness to Participate in Political and Civic Life: Political Interest and Knowledge as Mediators. *Journal of Youth and Adolescence*, *51*, 1886–1900. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01639-9

Amanda, T., Novriza, H., & Dhewantoro, S. (n.d.). *Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural*.

Anugrah. (2024). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. *4*(1), 22–34. https://doi.org/10.53299/jppiv4i1.403

Azil Hanifa Azzahra, Najmi Nawry, & Sasmi Nelwati. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 23–31. https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2287

Creswell, J. W., & P. C. N. (2016). (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.

Denzin, N. K. (2002). *The interpretive process. The qualitative researcher's companion*.

Hadian, V. A., Suryadi, K., Darmawan, C., Danial, E., & Raudlatul Aulia, S. (2025). *Pengaruh Diskusi Politik melalui Grup WhatsApp terhadap Karakter Kewarganegaraan Digital Mahasiswa*. *10*(1), 382–392. https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.11985

Ikhsan, M., Asrizal, Fithriani, R., Habibi, A., Ridwan, M., Rusydi, I., Sipahutar, A., & Suhardi, B. (2021). Digital Literacy in the Post-Truth Era: Employing Fact-Checking Applications in Adult EFL Reading Classes. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v5i4.8704

Kashiha, H. (2022). Academic lectures versus political speeches: Metadiscourse functions affected by the role of the audience. *Journal of Pragmatics*. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2022.01.003

Mata, J. C., Bacarizo, B. T., & Fernández, A. S. (2021). Young people confronting the challenge of reading and interpreting a digital world. *Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature*. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.905

Moento, P. A., Saputro, R., Tjilen, A. P., Jeujanan, W., Oja, H., & Serano, V. R. (2025). *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia Sosialisasi Pentingnya Ilmu Politik Bagi Siswa Sma Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Dan Partisipasi Dalam Pemerintahan*. *3*(2), 282–289. https://jurnal.ypkpasid.org/index.php/jtpi

Moleong, L. J. (2017). *Pendekatan dan Jenis Penelitian. Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.

Muñiz-Velázquez, J. (2023). (Dis)Information Literacy: A Democratic Right and Duty of All Citizens. *Media and Communication*. https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.7029

Nechesov, A., & Ruponen, J. (2024). Empowering Government Efficiency Through Civic Intelligence: Merging Artificial Intelligence and Blockchain for Smart Citizen Proposals. *Technologies*. https://doi.org/10.3390/technologies12120271

Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Vol. 7, Number 1).

Okorokova, M., & Nikiforova, D. (2025). Problems of forming political literacy of youth. *Vestnik of North-Eastern Federal University. Social Science*. https://doi.org/10.25587/2587-5612-2024-4-76-80

Rohmatin, Z., Taufiq, A., Nurmadina, N. A., Rizqullah, R., & Hasibuan, H. (2024). Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.454

Salsabila, S. A. (n.d.). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *6*, 2024.

Schutz, A. (1967). *The phenomenology of the social world.* Northwestern university press.

Setiawan, T., Hikam, M. A. S., Suhartomo, A., Tamba, S. M., Hasibuan, E. W., Kartodirdjo, A. M. K., Fauzia, S., & Arrazaq, T. A. (2022). The Social Network Approach for Analyzing Political Participation in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: Scoping Review. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, *6*(2), 241–262. https://doi.org/10.28932/humanitas.v6i2.5620

Sugiono, S., N. N., & W. A. (2020. (2020). Uji validitas dan reliabilitas alat ukur SG posture evaluation. *Jurnal Keterapian Fisik*, *5*(1), 55–61.

Sulina, W., Riyanti, I., & Serli, W. O. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Meninjau Tujuan Utama Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dasar. In *Journal of Innovative Research* (Vol. 01). https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada

Widiatmaka, P. (2022). *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik*. *5*(1). http://kriminalitas.com